

URGENSI LEGITIMASI DAN KOMUNIKASI DALAM MENYUSUN KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Nisa Amalia Kholifah, Farid Setiawan, Nurullita Almunawaroh, Afaf Wafiqoh Nusaibah, Silviana Putri Kusumawati, Shella Masrofah, Fika Wahyu Nurita

Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta
Email: afaf1900031053@webmail.uad.ac.id

ABSTRACT

This article will discuss the urgency of legitimacy and communication in formulating education policy. The purpose of this research is to describe a process and problems and then analyze the importance of communication and legitimacy in education policy. The research method is a qualitative research with a literature study approach. The results of the study indicate that the legitimacy of educational policies is needed so that a policy that has been formulated can be ratified as a valid policy to be enforced. Likewise, communication in policy making is also very necessary so that there are no obstacles in the form of misunderstandings in the preparation of education policies. So it can be concluded that legitimacy and communication are very urgent factors in the formulation of educational policies.

Keywords: Urgency, Legitimacy, Communication, Education Policy

ABSTRAK

Artikel ini akan membahas mengenai urgensi dari legitimasi serta komunikasi dalam menyusun kebijakan pendidikan. Tujuan dari penelitian ini adalah memaparkan suatu proses serta problem-problem selanjutnya menganalisis pentingnya komunikasi dan legitimasi dalam kebijakan pendidikan. Metode penelitian yang dilakukan berupa penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legitimasi kebijakan pendidikan diperlukan agar suatu kebijakan yang telah dirumuskan dapat disahkan sebagai kebijakan yang valid untuk diberlakukan. Begitupun dengan komunikasi dalam penyusunan kebijakan juga sangat diperlukan agar tidak terjadi hambatan yang berupa kesalah pahaman dalam penyusunan kebijakan pendidikan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa legitimasi dan komunikasi menjadi faktor yang sangat *urgent* dalam perumusan kebijakan pendidikan.

Kata kunci : Urgensi, Legitimasi, Komunikasi, Kebijakan Pendidikan

PENDAHULUAN

Kebijakan merupakan sistem yang mengendalikan suatu organisasi dan komponen di dalam kebijakan ada lima hal yakni: tujuan, rencana, program, keputusan, dampak. Karakteristik yang dimiliki kebijakan ada beberapa yakni: memiliki tujuan pendidikan, terpenuhnya aspek legal dan formal, memiliki konsep operasional, dibuat

oleh yang berwenang, dapat dievaluasi, memiliki sistematika, implementasi kebijakan pendidikan. Pada aspek konsep dasar kebijakan bisa disimpulkan bahwa kebijakan memiliki komponen dan karakteristik yang mana kedua aspek ini merupakan hal yang akan menjadi senjata kebijakan pendidikan untuk mengendalikan system suatu organisasi. Dalam konsep dasar kebijakan ini akan ada pengembangan visi dan misi suatu organisasi agar tujuan organisasi tersebut tercapai dari segi komponen dan karakteristik. Pada akhirnya konsep dasar kebijakan pendidikan merupakan pijakan pertama dalam system suatu organisasi dan menjadi pondasi utama dalam tingkat keberhasilan tujuan pendidikan atau tujuan organisasi. Kebijakan menjadi hal yang sangat membantu masyarakat dalam tatanan hidup karena dengan adanya kebijakan masyarakat akan lebih terarah dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari dalam hidupnya. Kebijakan pun menjadi mengikat dan luas apabila terjadi penambahan di dalam masyarakat, seperti yang diketahui bahwa jumlah masyarakat sangat tinggi pada setiap harinya. Dengan bertambahnya jumlah masyarakat maka kebijakan pendidikan menjadi suatu timbangan yang mempunyai konsep dasar yakni sistem nilai-nilai atas faktor yang situasional.

Di dalam kebijakan harus memiliki komunikasi serta legitimasi yang mana komunikasi menjadi perantara dalam merumuskan kebijakan atau aturan agar proses di dalam kebijakan akan lebih mudah dilaksanakan untuk meminimalisir hambatan dan ketika kebijakan dirumuskan maka legitimasi menjadi hal yang wajib dilaksanakan. Legitimasi ini akan sangat penting bagi masyarakat di Negara karena dengan legitimasi masyarakat bisa merasakan dampak dan manfaat setelah mendapatkan legitimasi. Namun, bagaimana dengan kemunculan urgensi di dalam legitimasi dan komunikasi kebijakan pendidikan ini?. Dalam urgensi diharapkan dalam perumusan kebijakan harus sangat jelas sehingga setiap individu masyarakat mendapatkan arti dari pendidikan dengan cara yang tepat dalam mengimplementasikan kependidikan itu sendiri. Di dalam urgensi ini juga menjadi bukti yang kuat bahwa kebijakan pendidikan disusun untuk menjadi aturan dan pedoman di dalam melakukan tindakan, mengarahkan kegiatan di dalam suatu organisasi ataupun sekolah serta perguruan tinggi dengan kesinambungan masyarakat dan juga pemerintah guna cita-cita yang dituju. Urgensi juga menjadi tolak ukur dalam tujuan kebijakan pendidikan yang mana pemerintah memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat, karena itu kebijakan pendidikan memiliki langkah-langkah yang tersusun sehingga apabila terdapat rumusan masalah yang akan diselesaikan

menjadi satu cangkupan dengan variable-variabel langkah yang sudah disusun. Maka dengan adanya pembahasan guna komunikasi dan legitimasi kebijakan ini menjadi urgensi untuk kebijakan pendidikan bagaimana peran dan fungsi serta solusi dalam mengkoordinir permasalahan di dalam kebijakan pendidikan. (Farid Setiawan, 2021).

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian kualitatif dalam mendapatkan hasil penelitiannya tidak menggunakan perhitungan angka dengan memanfaatkan cara perhitungan olah data didalamnya, yang berbanding terbalik dengan jenis penelitian kuantitatif yang dalam mendapatkan suatu hasil penelitian menggunakan cara perhitungan olah data. Gambaran umum dari pelaksanaan jenis penelitian kualitatif adalah hasil penelitian bisa dilihat dari suatu fakta, peristiwa, serta keadaan sosial yang yang disesuaikan dengan topik yang diangkat. (Nusaibah *et al.*, 2021)

Dalam proses pencarian data dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode studi pustaka (*library research*). Dalam hal ini peneliti memanfaatkan literasi digital maupun sumber lainnya dalam mengumpulkan data-data yang peneliti butuhkan dalam menyusun penelitian ini. Setelah data yang dikumpulkan maka data dianalisis kembali sehingga mendapatkan suatu gagasan yang disesuaikan dengan topik yang diangkat dalam penelitian ini. Setelah mendapatkan suatu gagasan yang ada disatukan utuh menjadi penelitian yang dapat menambah khazanah keilmuan. (Ayunda *et al.*, 2022)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian dan Proses Legitimasi Pendidikan Islam

1. Pengertian Legitimasi Pendidikan Islam

Kebijakan kerap diartikan dengan suatu peraturan, program, kesepakatan, dan keputusan. Kebijakan berupa aturan resmi dan tertulis. Kebijakan dibuat oleh lembaga tertentu yang memiliki hak dan wewenang untuk membuat suatu peraturan. Kebijakan bersifat mengikat sehingga harus dilakukan oleh sekelompok organisasi atau lembaga tertentu. Kebijakan harus proaktif dan problem solving. Hal ini dikarenakan suatu kebijakan menentukan arah jalannya atau tujuan dari suatu lembaga atau organisasi. Kebijakan lahir dari suatu tuntutan dan disesuaikan dengan perubahan yang terus

terjadi. Dalam suatu kebijakan yang dibuat, diperlukan legitimasi agar dapat digunakan oleh organisasi atau lembaga tersebut.

Legitimasi sering kali didasarkan pada sudut pandang suatu kekuasaan. Kekuasaan yang dimaksudkan adalah legitimasi menjadi sesuatu yang disahkan dan disetujui serta dilakukan oleh kelompok tertentu. Legitimasi berasal dari kata *lex* yang memiliki arti hukum. Legitimasi menyertakan suatu hukum dalam prosesnya. Karena terdapat unsur hukum didalamnya, maka legitimasi diadakan sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. Legitimasi tidak terpisahkan dengan unsur keaslian dan kenyataan. Hal ini dikarenakan suatu legitimasi haruslah berdasarkan pada fakta dan kebenaran. Legitimasi adalah suatu hal yang penting untuk dapat membuat suatu kelompok mentaati kebijakan yang telah ditetapkan.

Kebijakan dapat dilaksanakan apabila suatu kebijakan tersebut telah dilegitimasi. Kegiatan legitimasi berada diantara dua proses penting dalam kebijakan, yaitu pembuatan kebijakan dan pengesahan kebijakan. Kebijakan dan legitimasi berkaitan erat dengan kemasyarakatan. Suatu kebijakan dapat dilegitimasi apabila kebijakan tersebut diakui oleh masyarakat. Apabila masyarakat menolak kebijakan tersebut maka legitimasi tidak dapat dilakukan dengan artian lain perumusan kebijakan tersebut ditolak. Pengakuan persetujuan atau penolakan dalam masyarakat dilakukan melalui perwakilan masyarakat yang menyatakan suaranya. Oleh karenanya masyarakat memiliki peranan penting dalam proses legitimasi. Legitimasi adalah pemberian wewenang untuk membuat dan melaksanakan keputusan sebagai bentuk pengesahan dari masyarakat. (Maimunah and Delta, 2020)

Legitimasi dalam pendidikan sangat penting untuk memberikan otoritas atau wewenang agar suatu kebijakan yang telah dirumuskan dapat dijadikan sebagai kebijakan yang resmi dan valid sehingga dapat diberlakukan. Dengan legitimasi pendidikan maka suatu kebijakan akan mendapatkan pengakuan dari masyarakat dan lembaga yang terkait.

2. Proses Legitimasi Pendidikan Islam

Penelitian yang dilakukan Farid (2021) menjelaskan bahwa strategi yang digunakan untuk memperoleh dan mempertahankan keaslian dibagi menjadi 3, yaitu:

- 1) Emblematis, adalah strategi mempertahankan keaslian dengan menumbuhkan kepercayaan kepada masyarakat dan publik akan citra yang baik. Contohnya yaitu dengan mengadakan pameran dan atau seminar.
- 2) Prosedural, adalah strategi mempertahankan keaslian dengan memberikan dorongan bantuan material yang diberikan oleh pemerintah kepada tiap individu.
- 3) Materi, khususnya dengan mengadakan keputusan umum untuk memutuskan agen individu, kepala administrator, presiden, dan sebagainya.

Menurut Andrain yang dikutip Ramlan Subakti berdasarkan pedoman pengakuan dan bantuan masyarakat kepada badan publik, keaslian terdiri atas lima jenis, diantaranya:

- 1) Keaslian adat, daerah tertentu memberikan pengakuan dan dukungan kepada pelopor pemerintahan untuk memberikan penerimaan dengan didasarkan pada alasan bahwa dirinyalah yang paling visioner dan paling tepat sebagai pionir untuk wilayahnya.
- 2) Keaslian filosofis, daerah terkhusus setempat menawarkan bantuan kepada para pelopor pemerintahan yang didasarkan pada alasan bahwasanya pionir tersebut dipandang sebagai pelaksana sistem kepercayaan.
- 3) Keaslian ciri-ciri individu, daerah terkhusus setempat memberikan pengakuan dan dukungan kepada pelopor yang memiliki individual yang baik, seperti berkarisma, memiliki prestasi yang unggul, dan sebagainya.
- 4) Keaslian prosedural, daerah terkhusus memberikan pengakuan dan dukungan kepada pelopor yang memiliki sifat prosedural. Maksudnya adalah yang memiliki kewenangan dan dapat menjalankannya sesuai dengan peraturan perundangan.
- 5) Keaslian instrumental, daerah terkhusus memberikan pengakuan dan dukungan kepada individu yang berkenan memberikan bantuan kepada pemerintah dan pemerintah akan memberikan bantuan kepada daerah tersebut.

Dalam proses legitimasi, semua hal harus dipertimbangan dengan matang. Hal ini karena legitimasi tidak bisa sembarangan diberikan. Harus ada kejelasan dalam setiap pengambilan keputusannya. Dalam memegang keputusan, biasanya pihak pemerintah tidak hanya menggunakan satu jenis saja. Namun, biasa menggunakan dengan 2 atau 3 jenis agar tidak terjadi kesalahan pemilihan. Selain mempertimbangkan jenisnya, penilaian penduduk dan masyarakat publik sangat diperlukan. Publik berperan

penting terhadap pertimbangan yang dilakukan. Dalam hal ini, tokoh kunci yang berperan sebagai tokoh yang menceritakan tentang penilaian publik. Tokoh kunci ini berasal dari berbagai kalangan tokoh masyarakat. Seperti tokoh dalam bidang agama, tokoh politik, tokoh sosial, dan tokoh ekonomi. Dalam tahap penilaian, dilakukan pula tahap diskusi yang dihadiri tokoh-tokoh masyarakat dari tokoh mayoritas hingga tokoh minoritas. Dalam hal ini, tokoh minoritas lebih diutamakan untuk saling berpendapat dan berdiskusi. Setelah pilihan terbaik didapatkan hal selanjutnya yaitu menimbulkan kepercayaan dan keyakinan terhadap masyarakat agar masyarakat dapat menerima legitimasi tersebut.

B. Alasan Pentingnya Legitimasi Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan dalam proses pengembangan kuantitas dan kualitas pendidikan, tentu memerlukan dasar atau legal standing yang mengikat atas kebijakan pendidikan, supaya dapat memperkuat kebijakan yang akan diterapkan. Tujuan adanya legitimasi adalah mampu memberikan wewenang otorisasi terhadap kebijakan pendidikan, sehingga disetiap tindakannya akan dipatuhi oleh sumber daya manusia (SDM) sebagai yang menjalankan atas kebijakan tersebut. Kebijakan pendidikan arah pijakan yang akan melahirkan otorisasi kebijakan ialah berdasarkan hukum peraturan negara tertinggi maupun terendah yang dapat menghasilkan legalitas. Hal ini, dianalisis secara hirarkis berorientasi pada penyusunan kebijakan yang diadopsi melalui Pancasila, UUD 1945 dan GBHN. (Maimunah, 2020)

Peraturan-peraturan diatas, memiliki dasar legalitas yang berbeda terkait pendidikan. Kedudukan Pancasila sebagai landasan sistem pendidikan di Indonesia, sedangkan UUD 1945 dan GBHN masing-masing sebagai landasan konstitusional dan operasional sistem pendidikan nasional. Maka perlu di pahami bahwa, penyusunan kebijakan pendidikan haruslah berdasarkan pada peraturan-peraturan yang ada, suatu kebijakan tentu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai landasan peraturan negara. Oleh karena itu, alasan diterimanya legitimasi kebijakan pendidikan, dapat dianalisis dari 3 sudut pandang. *Pertama*, kebijakan pendidikan yang akan berorientasi terhadap kemajuan pendidikan. *Kedua*, kebijakan pendidikan yang tidak akan merugikan masyarakat dan *ketiga*, kebijakan pendidikan wajib berlandaskan pada peraturan negara, yaitu Pancasila, UUD 1945 dan GBHN. (Anwar, 2014)

Kebijakan pendidikan mengalami perkembangan sesuai dengan kebutuhan pada zamannya. Seperti sejarah Jepang yang dapat ditelaah dari proses penetapan kebijakannya. Jepang mempunyai Undang-Undang pendidikan yang ditetapkan secara konstitusional tahun 1947, Memuat 5 pokok prinsip dalam kebijakan pendidikan. 5 pokok prinsip ini adalah sebagai pondasi dalam tahapan perumusan kebijakan, khususnya berkenaan dengan dunia pendidikan. Adapun 5 prinsip tersebut diantaranya sebagai berikut (Robertua, 2017):

- 1) Prinsip legalisme. Merupakan tahapan-tahapan (mekanisme) aturan dalam menetapkan suatu kebijakan pendidikan. Undang-Undang adalah pusat yang mengatur batasan-batasan didalam perumusan kebijakan. Disamping itu, sebelum terjadinya perang dunia II, awalnya problem pendidikan biasanya diputuskan oleh peraturan kekaisaran Jepang dan mengabaikan konstitusional. Namun, setelah terjadinya reformasi dalam pendidikan, permasalahan-permasalahan pendidikan akhirnya diambil alih oleh konstitusional negara.
- 2) Prinsip administrasi (menjadi budaya demokratis). Merupakan sistem yang ada dalam pengelolaan pendidikan, yaitu biasa dikenal sebagai administrasi pendidikan. Fenomena perumusan kebijakan berkaitan dengan sistem administrasi pendidikan, mengindikasikan bahwa, sistem administrasi pendidikan harus dibangun berdasarkan 2 formulasi kebijakan pendidikan beserta prosesnya yaitu, atas dasar konsensus nasional dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
- 3) Prinsip netralitas. Merupakan suatu komitmen yang dibangun atas kesepakatan bersama didalam wewenang atau komponen yang mengelola pendidikan itu sendiri. Komponen-komponen pengelola kebijakan pendidikan harus bersifat independent. Maka, prinsip netralitas mencerminkan tidak adanya intervensi dari pihak luar yang dapat mempengaruhi suatu kebijakan.
- 4) Prinsip penyesuaian dan penetapan kondisi pendidikan. Merupakan analisis kebutuhan pendidikan yang dibebankan kepada wewenang pusat dan lokal sebagai pengelola pendidikan. Tanggung jawab ini, berupa pengembangan pendidikan dari segi kelayakannya, seperti membangun gedung sekolah, menyediakan fasilitas yang memadai dan sarpras (sarana dan prasarana sekolah) lainnya yang cukup, demi mencapai tujuan pendidikan.

- 5) Prinsip desentralisasi. Berdasarkan fungsi pemerintah lokal berkenaan dengan pengelolaan pendidikan, mengindikasikan bahwa, pendidikan harus dikelola secara otonomi oleh pemerintah lokal, karena hal tersebut adalah bagian dari tanggung jawab pemerintahan lokal.

Berdasarkan analisis bahwa, Jepang adalah suatu negara yang serius dalam memperhatikan kualitas kebijakan pendidikannya, melalui perumusan kebijakan atas dasar prinsip-prinsip sebagai batasan dalam menyusun kebijakan pendidikan. Maka kemudian, dikaitkan dengan pentingnya legitimasi kebijakan pendidikan, seperti dalam point 1 bahwa, Jepang memegang prinsip legalisme, menunjukkan alasan mengapa pentingnya legitimasi kebijakan pendidikan itu sendiri. Dalam pandangan tertentu, pentingnya legitimasi kebijakan pendidikan, akan menumbuhkan jiwa disiplin terhadap SDM pendidikan, namun problem lain adalah SDM pendidikan bisa saja mengabaikan kebijakan pendidikan itu, yang orientasinya akan memunculkan masalah-masalah baru dalam pendidikan. Maka, sebelum menyusun kebijakan pendidikan, haruslah melalui survey secara mendalam dan menyeluruh, sehingga perumusan kebijakan pendidikan, sesuai dengan target, budaya, geografis dan penyesuaian maupun kondisi ruang lingkup pendidikan.

Relevansi alasan pentingnya kebijakan terhadap pendidikan Islam, secara sederhana dapat dianalisis melalui berbagai konsep paradigma dalam pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam adalah mewujudkan peserta didik yang bertakwa kepada Allah dan memiliki kepribadian akhlakul karimah yang baik. Dalam proses mewujudkan tujuan pendidikan Islam, tentu adanya kebijakan pendidikan Islam sebagai pembantu dalam pelaksanaannya, maka kemudian, untuk mengikat kebijakan itu secara konstitusional, diperlukan adanya legitimasi kebijakan pendidikan Islam, supaya dalam membuat kebijakan, hak sepenuhnya akan dimiliki oleh wewenang pengelola pendidikan Islam. Maka, point utamanya alasan mengapa pentingnya legitimasi pendidikan Islam adalah adanya wewenang otorisasi dalam mengelola pendidikan Islam dan menjauhkan intervensi kebijakan pihak lain yang dapat merugikan kebijakan pendidikan Islam. (Hoddin, 2020)

C. Problem yang dihadapi dan Urgensi Legitimasi dalam Menyusun Kebijakan Pendidikan

1. Problem Legitimasi Kebijakan Pendidikan

Problematika dapat diartikan suatu persoalan atau permasalahan yang muncul. (Susiana, 2017) Penyusun merangkum beberapa permasalahan-permasalahan yang muncul dalam proses dari legitimasi kebijakan pendidikan mengutip dari (Madjid, 2018) sebagai berikut:

- a) Terdapat suatu pandangan serta pendapat dari eks actor yang sudah tidak menjadi actor lagi. Eks aktor beranggapan bahwa kebijakan yang sebelumnya dirumuskan dan diimplementasikan masih layak untuk diimplementasikan maupun dipertahankan sampai saat ini, padahal majunya suatu zaman pasti akan berubah pula suatu kebijakan karena harus menyesuaikan dengan situasi serta keadaan yang ada.
- b) Terdapat suatu pandangan dari masyarakat yang masih menggunakan pemikiran tradisional pada suatu kebijakan yang baru dirumuskan. Kebijakan yang baru saja dirumuskan harus sejalan dengan pemikiran-pemikiran tradisional, jika tidak sejalan maka masyarakat menganggap bahwa kebijakan tersebut mentradisi. Pada dasarnya anggapan mentradisi itu sulit untuk dirubah, dan untuk merubah masyarakat yang masih memiliki pemikiran tradisional itu sangat sulit dan membutuhkan waktu yang lama.
- c) Terdapat eks aktor dan kelompok yang memiliki pemikiran tradisional yang menggiring para pengikut. Umumnya seorang pengikut adalah mereka yang mengikuti segala langkah-langkah pemimpinnya, sehingga pada hal ini legitimasi sangatlah menjadi terhambat.
- d) Terdapat sekelompok resisten yang memiliki pandangan, visi, serta kepentingan yang bertolak belakang dengan perumus kebijakan, kelompok resisten umumnya mereka sangat sulit untuk diajak kerja sama. Jika dalam pelaksanaan legitimasi terhambat maka para pemangku kebijakan harus mendekati kelompok resisten tersebut agar dapat benar-benar bisa memberikan dukungan pada kebijakan yang dirumuskan tersebut.

Kebijakan yang ada pada masa orde baru diketahui bahwa banyak merumuskan kebijakan pendidikan menggunakan proses yang tidak wajar dan semestinya. Dalam

perumusan suatu kebijakan pendidikan jika dalam perumusannya tidak sesuai dengan proses politik yang wajar dan semestinya maka akan mendapatkan suatu kendala dalam legitimasinya. Permasalahan legitimasi yang ada adalah suatu bentuk penolakan masyarakat terhadap kebijakan yang dirumuskan oleh pemangku kebijakan, sehingga kebijakan yang ad disebut kebijakan yang tidak mendapat suatu dukungan.

2. Urgensi Legitimasi dalam Menyusun Kebijakan Pendidikan

Penyusunan maupun perumusan kebijakan pendidikan menjadi suatu hal yang mendasar dalam proses menjawab keresahan yang asalnya dari permasalahan-permasalahan yang ada dalam dunia pendidikan. Penyusunan suatu kebijakan harus dapat benar-benar disesuaikan dengan situasi, kondisi, serta keresahan yang ada dalam dunia pendidikan agar nantinya kebijakan pendidikan bisa tepat sasaran dalam proses pelaksanaannya. Dalam penyusunan kebijakan pendidikan para penyusun juga harus memperhatikan dan betul-betul melihat dari pespektif berbagai pihak yang terkait agar kebijakan yang disusun mendapatkan suatu legitimasi didalamnya. Sehingga setelah kebijakan pendidikan dirumuskan serta telah mendapatkan legitimasi kemudian kebijakan pendidikan dilakukan ataupun diimplementasikan. (Suhelayanti, 2020)

Adanya legitimasi dalam penyusunan kebijakan pendidikan sangatlah *urgent*, karena jika tidak ada legitimasi didalam penyusunan kebijakan pendidikan maka kebijakan pendidikan tidak bisa diberlakukan dengan baik, dan jika kebijakan pendidikan dipaksa untuk tetap dijalankan tanpa adanya legitimasi didalamnya maka secara langsung nantinya dapat memunculkan suatu konflik antara pemangku kebijakan dengan subjek yang dituju dari kebijakan pendidikan yang disusun. Dan jika kebijakan pendidikan yang ada belum mendapatkan legitimasi didalamnya maka pemangku kebijakan harus benar-benar bisa mencari berbagai cara untuk bisa mendapatkan suatu legitimasi untuk susunan kebijakan pendidikan yang ada. Tidak jarang untuk mendapatkan legitimasi jika dilihat dari berbagai problem legitimasi kebijakan pendidikan yang ada maka akan membutuhkan waktu yang lama serta harus memiliki cara-cara yang jitu didalamnya, sehingga dalam proses pelaksanaannya maka dari itu legitimasi tidak dapat dipisahkan dalam penyusunan kebijakan

pendidikan dalam hal ini legitimasi menjadi *urgent* dalam penyusunan kebijakan pendidikan.

D. Pengertian komunikasi dan Pentingnya Komunikasi Kebijakan Pendidikan

1. Pengertian Komunikasi

Kata komunikasi ini berasal dari bahasa latin yaitu komunis yang berarti sama *communico, communication* maupun *communicare* yang artinya membuat sama. Arti kata yang mirip dari kata komunikasi adalah *community* yang berarti juga menekankan kesamaan. Sehingga dari arti kata tersebut dapat dipahami komunikasi berarti adalah sekelompok manusia yang bersama untuk mencari tujuan yang sudah disepakati. Jadi dapat dipahami bahwa dari komunikasi itu dapat diartikan sebagai suatu tindakan dan proses-proses makhluk hidup di dalam suatu kelompok yang digunakan sebagai penguat struktural kelompok tersebut. Ruben dan Stewart berpendapat bahwa dalam keilmuan komunikasi ini merupakan salah satu ilmu yang di dalamnya terdapat ilmu perilaku maupun ilmu sosial yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari (Nofrion, 2018).

Komunikasi dapat diartikan sebagai sebuah proses dalam pertukaran ide pesan dan kontak serta termasuk interaksi sosial yang dilakukan sebagai aktivitas dalam kehidupan manusia. Adanya komunikasi maka manusia akan dapat berinteraksi satu sama lain dan membina kerjasama sehingga dapat mempengaruhi dalam bertukar ide maupun pendapat. Komunikasi dalam kehidupan manusia memiliki peran penting dalam menunjang keberlangsungan hidup manusia tersebut, karena dalam kehidupan manusia diperlukan untuk bersosial satu sama lainnya sehingga manusia yang tidak berkomunikasi akan sulit untuk bertahan hidup maupun berkembang. Makna dari komunikasi yaitu (Nofrion, 2018):

- 1) Komunikasi merupakan suatu proses yang mencakup dari aktivitas dalam rangka untuk mencapai dari tujuan komunikasi. Artinya proses yang dilalui dalam komunikasi itu bukan dialami dengan kebetulan saja namun proses dalam komunikasi merupakan sebuah proses yang disengaja dan diarahkan untuk mencapai dari tujuan komunikasi.
- 2) Terdapat komponen-komponen dalam komunikasi yaitu sumber pesan, pesan serta penerima pesan. Komponen-komponen tersebut yang akan mempengaruhi

terjadinya dan terjadinya komunikasi yang dilakukannya sehingga jika salah satu komponen tersebut hilang maka makna dari komunikasi juga hilang.

Komunikasi antar makhluk hidup dipahami juga sebagai komunikasi yang dapat menjadi gambaran Bagaimana makhluk hidup tersebut dapat menyampaikan suatu informasi yang terdapat simbol-simbol verbal maupun nonverbal kepada penerima informasi tersebut sehingga penerima pesan dapat menafsirkan isi dari pesan tersebut dan terjadi perubahan dari pengetahuan keterampilan dan sikap. (Nofrion, 2018)

Komunikasi kebijakan pendidikan Islam dapat diartikan sebagai komunikasi yang menyangkut terkait kebijakan yang akan diterapkan dalam pendidikan, komunikasi dapat berupa sosialisasi yang akan dilaksanakan dari pembuat kebijakan terhadap, pelaksana kebijakan dan masyarakat yang akan melaksanakan kebijakan. Komunikasi dilakukan karena agar dapat meminimalisir sesenjangan dalam kebijakan yang dibuat tersebut.

2. Pentingnya Komunikasi Kebijakan Pendidikan

Komunikasi dalam kebijakan pendidikan dapat diartikan sebagai proses penyampaian informasi, ide, maupun gagasan tentang peraturan-peraturan dalam pendidikan. Pada proses implementasi kebijakan pendidikan, komunikasi sangat diperlukan sebab hal ini memiliki beberapa alasan diantaranya:

- 1) Agar para pelaksana kebijakan pendidikan serta khalayak umum dapat lebih memahami secara mendalam, salah satu penyebab utamanya suatu kebijakan tidak dapat diterima adalah karena masyarakat kurang memahami mengenai rumusan kebijakan atau bahkan karena suatu kebijakan tersebut bertentangan dengan keadaan masyarakat. Oleh sebab itu suatu kebijakan pendidikan harus selalu dikomunikasikan dengan masyarakat agar dapat dipahami lebih dalam.

- 2) Agar tidak terjadi kesalahpahaman

Kesalahpahaman menjadi penyebab utama gagalnya sosialisai suatu rumusan kebijakan. Jika komunikasi dilakukan secara terus menerus, maka hal ini akan dapat mengoreksi dan menanggulangi kesalahpahaman masyarakat terhadap suatu kebijakan. (Setiawan *et al.*, 2021)

E. Problematika dan Urgensi Komunikasi Pendidikan

1. Problematika Komunikasi Kebijakan Pendidikan

Menurut Farid (Setiawan *et al.*, 2021) Problem yang menjadi penghambat dalam proses komunikasi pendidikan dibagi menjadi 3 sumber diantaranya sebagai berikut.

a. Berasal dari Komunikator.

Problem yang asalnya dari komunikator adalah sebagai berikut.

- 1) Komunikator kurang lihai dalam menyampaikan atau memberikan pesan maupun informasi mengenai kebijakan pendidikan, dengan demikian pesan serta informasi menjadi kurang jelas dalam penyampaiannya sehingga pesan maupun informasi tidak dapat disampaikan dengan baik.
- 2) Perbedaan persepsi antara komunikator dengan komunikan, dalam hal ini informasi maupun pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan menjadi tidak tepat.
- 3) Kurangnya kualitas komunikator dalam sudut pandang komunikan, kualitas dalam sudut pandang komunikan itu terdapat banyak hal salah tiganya adalah seberapa komunikator memiliki kualitas ditengah masyarakat atau sudut pandang komunikan, ciri khas, maupun kemampuan yang dimiliki komunikator.

b. Berasal dari Pesan itu Sendiri

Problema yang asalnya dari pesan itu sendiri adalah sebagai berikut. (Setiawan *et al.*, 2021)

- 1) Susunan kebijakan yang kurang jelas, susunan kebijakan yang kurang jelas akan membuat komunikan kurang jelas dalam menangkap arahan dari kebijakan yang ada.
- 2) Susunan kebijakan yang asing, susunan kebijakan pendidikan yang asing secara langsung akan memberikan *feedback* penolakan oleh komunikan sendiri, hal ini disebabkan kebijakan tidak disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang ada sehingga pemangku pendidikan dalam hal ini harus bisa menerima situasi dan kondisi yang ada.
- 3) Susunan kebijakan yang kurang realistis, dalam hal ini menjadikan komunikan tidak peduli dengan pesan yang disampaikan karena dianggap suatu hal yang tidak ada nilainya dan tidak mungkin untuk dikerjakan.

c. Berasal dari Komunikasikan

Problema yang asalnya dari komunikasi adalah sebagai berikut.

- 1) Komunikasi yang memiliki banyak perbedaan, banyak perbedaan yang dimaksud adalah perbedaan tingkat pendidikan yang dimiliki, perbedaan suku, perbedaan agama dan lain sebagainya. Perbedaan yang ada menyebabkan sulitnya menyampaikan komunikasi yang sama dalam hal ini komunikator harus bisa menyesuaikan dengan keadaan yang dimiliki oleh komunikasi yang ada.
- 2) Terdapat suatu kesalahan dalam penerimaan pesan maupun informasi oleh komunikasi, dalam hal ini menyebabkan terjadinya keliruan pemahaman komunikasi mengenai kebijakan pendidikan yang disampaikan (Setiawan *et al.*, 2021).

2. Urgensi Komunikasi Kebijakan Pendidikan

Strategi komunikasi menjadi suatu sub tema yang *urgent* dalam konteks pendidikan. Fungsi adanya strategi komunikasi dalam konteks pendidikan adalah sebagai penyampaian pesan yang sifatnya mengharuskan disampaikan oleh pemangku kebijakan kepada seluruh pelaku dalam pendidikan. Pesan-pesan yang disampaikan tidak lain adalah yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan berupa standar nasional pendidikan. Orang yang menyampaikan suatu informasi ataupun pesan adalah seorang komunikator, (Kuen, 2019) menjadi seorang komunikator dalam menyampaikan pesan atau informasi yang sesuai yang ada komunikator tersebut harus benar-benar memiliki sifat bijaksana. Adanya strategi komunikasi menjadi suatu hal yang terpenting dalam merealisasikan suatu program yang ada dalam aktivitas pendidikan, bahkan strategi komunikasi menjadi salah satu aspek yang ada dalam manajemen pendidikan yang tersistem. Strategi komunikasi merupakan suatu komponen terpenting dalam proses komunikasi kebijakan pendidikan.

Tidak dipungkiri juga strategi komunikasi menjadi suatu komponen yang sangat vital bagi setiap kelembagaan ataupun keorganisasian, bahkan komunikasi menjadi tolak ukur keberhasilan dalam pelaksanaan program kerja dari setiap kelembagaan ataupun keorganisasian. Maka dari itu komponen strategi komunikasi dalam komunikasi sangat penting bagi lembaga pendidikan karena secara langsung menjadi suatu alat penggerak kemana arah pendidikan untuk mewujudkan keberhasilan

didalamnya. Dunia pendidikan dan suatu ilmu komunikasi keduanya tidak dapat dipisahkan, karena didalam pelaksanaan program pendidikan didalamnya terdapat peran orang banyak, dan orang banyak tersebut menjalankan atau mengerjakan segala aktivitas yang ditugasinya mengandalkan suatu komunikasi guna untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Orang banyak dalam hal ini adalah para pelaku pemangku kebijakan serta staf-staf yang ada dibidangnya masing-masing yang tugasnya antara lain adalah mulai dari aspek kebaikan, penyusun program, penyusun target. Para komunikator menjadi suatu pemeran utama dalam pelaksanaan suatu program dalam pendidikan, dengan demikian komunikasi menjadi suatu hal yang sangat urgent dalam pelaksanaan program pendidikan khususnya dalam menetapkan dan merealisasikan suatu kebijakan pendidikan. (Suryana, 2021)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Legitimasi diartikan sebagai suatu hal yang penting untuk dapat membuat suatu kelompok mentaati kebijakan yang telah ditetapkan. Suatu kebijakan dapat dilaksanakan apabila suatu kebijakan tersebut telah melalui proses legitimasi, serta kebijakan dapat dilegitimasi apabila kebijakan tersebut diakui oleh masyarakat. Berkenaan dengan hal itu, maka legitimasi dalam pendidikan sangat penting untuk memberikan otoritas atau wewenang agar suatu kebijakan yang telah dirumuskan dapat dijadikan sebagai kebijakan yang resmi dan falid sehingga dapat diberlakukan.
2. Problem yang dihadapi dalam legitimasi kebijakan pendidikan, diantaranya terdapat suatu pandangan serta pendapat dari eks aktor yang sudah tidak menjadi aktor lagi, terdapat suatu pandangan dari masyarakat yang masih menggunakan pemikiran tradisional pada suatu kebijakan yang baru dirumuskan, terdapat eks aktor dan kelompok yang memiliki pemikiran tradisional yang menggiring para pengikut, dan terdapat sekelompok resisten yang memiliki pandangan, visi, serta kepentingan yang bertolak belakang dengan perumus kebijakan.
3. Adanya legitimasi dalam menyusun kebijakan sangatlah *urgent*, karena jika tidak ada legitimasi didalam penyusunan kebijakan pendidikan maka kebijakan pendidikan tidak bisa diberlakukan dengan baik, jika kebijakan pendidikan dipaksa untuk tetap dijalankan tanpa adanya legitimasi didalamnya maka secara langsung nantinya dapat

memunculkan suatu konflik antara pemangku kebijakan dengan subjek yang dituju dari kebijakan pendidikan yang disusun, dan jika kebijakan pendidikan yang ada belum mendapatkan legitimasi didalamnya maka pemangku kebijakan harus benar-benar bisa mencari berbagai cara untuk bisa mendapatkan suatu legitimasi untuk susunan kebijakan pendidikan yang ada.

4. Komunikasi dalam kebijakan pendidikan dapat diartikan sebagai proses penyampaian informasi, ide, maupun gagasan tentang peraturan-peraturan dalam pendidikan. komunikasi sangat diperlukan sebab hal ini memiliki beberapa alasan, yakni agar para pelaksana kebijakan pendidikan serta khalayak umum dapat lebih memahami secara mendalam dan agar tidak terjadi kesalahpahaman.
5. Problematika dalam komunikasi kebijakan pendidikan terbagi menjadi 3 yakni berasal dari komunikator, berasal dari pesan itu sendiri dan berasal dari komunikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M. E. (2014) 'Menelusuri Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia', *Edukasi Islami Jurnal Pendidikan Islam*, 03(1), pp. 483–496.
- Ayunda, A. Z. et al. (2022) 'TANTANGAN MULTIKULTURALISME DI INDONESIA : MENYOAL RELASI AGAMA DAN RUANG PUBLIK', *ALSYS Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan*, 2, pp. 1–18.
- Hodidin, M. S. (2020) 'Dinamika Politik Pendidikan Islam Di Indonesia; Studi Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Pra-Kemerdekaan hingga Reformasi.', *Jurnal Ilmiah Iqra*, 14(1), pp. 15–30. doi: 10.30984/jii.v14i1.1035.
- Kuen, F. A. (2019) 'PERANAN KOMUNIKASI ANTARPRIBADI TERHADAP HUBUNGAN MASYARAKAT KEKAMPARAN TAMALATE KELURAHAN MANGASA KOTA MAKASSAR', *Jurnal Ilmiah Pranata Edu*, 1(1), pp. 39–47.
- Madjid, A. (2018) *Analisis Kebijakan Pendidikan*.
- Maimunah (2020) 'Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Politik Islam Di Indonesia: Sistem, Manajemen, Dan Lembaga Pendidikan Islam', *Jurnal Al-Afkar*, 8(2), pp. 21–50. doi: 10.31933/jimt.v3i1.668.
- Maimunah, M. and Delta, S. (2020) 'FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SISTEM MANAJEMEN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DALAM MEMPENGARUHI KEBIJAKAN POLITIK PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA', *Al-Afkar: Jurnal*

Keislaman & Peradaban, 8(2), pp. 21–50.

Nofrion (2018) *Komunikasi Pendidikan Penerapan Teori dan Konsep Komunikasi dalam Pembelajaran*. 2nd edn. Edited by Wahyudin Endang. Jakarta: Prenadamedia Group.

Nusaibah, A. W. *et al.* (2021) ‘Implementasi Metode Pembelajaran Role Playing dalam Mata Pelajaran Akidah Akhlak untuk Membentuk Akhlakul Karimah Peserta Didik Era Milenial’, *TARLIM Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 4(2), pp. 107–122.

Robertua, V. (2017) ‘Krisis Legitimasi Energi Nuklir Dalam Ekonomi Politik Internasional: Studi Kasus Fukushima’, *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, 7(1), pp. 47–62.

Setiawan, F. *et al.* (2021) ‘Legitimasi dan Komunikasi Kebijakan Pendidikan’, *Jurnal Pendidikan Dasar dan Keguruan*, 6(2), pp. 12–19.

Suhelayanti (2020) ‘Analisis Kebijakan Pendidikan’, *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 1(1), pp. 11–26. doi: 10.32505/lentera.v1i1.1662.

Suryana, C. (2021) *Komunikasi Kebijakan Pendidikan*.

Susiana (2017) ‘Problematika Pembelajaran PAI di SMKN 1 Turen’, *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*, 2(1), pp. 73–88. doi: 10.25299/al-thariqah.2017.vol2(1).648.